

**STRATEGI SEKTOR PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN
JUMLAH POTENSI WAJIB PAJAK PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Lulus Sarjana Terapan Program
Studi Manajemen Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Bali

Oleh:

GEDE PRAMUDYA ANANTA HAMBARSIKA
NIM : 2215764022

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**STRATEGI SEKTOR PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN
JUMLAH POTENSI WAJIB PAJAK PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Lulus Sarjana Terapan Program
Studi Manajemen Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Bali

Oleh:

GEDE PRAMUDYA ANANTA HAMBARSIKA
NIM : 2215764022

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

1. Judul Skripsi : Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
2. Penulis
 - a. Nama : Gede Pramudya Ananta Hambarsika
 - b. NIM : 2215764022
 - c. Jurusan : Administrasi Bisnis
 - d. Program Studi : D4 Manajemen Bisnis Internasional

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. I Ketut Yasa, MM
NIP 196102271990031001

Pembimbing II



Kasiani, SE, M.Si
NIP 196204211990032002

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
STRATEGI SEKTOR PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN
JUMLAH POTENSI WAJIB PAJAK PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN**

Oleh :

**GEDE PRAMUDYA ANANTA HAMBARSIKA
NIM 2215764022**

Disahkan:

Ketua Penguji



**Drs I Ketut Yasa, MM.
NIP. 196102271990031001**

Penguji I



**Wayan Suryathi, SE., MM.
NIP. 196510171990112001**

**Mengetahui
Jurusan Administrasi Bisnis
Ketua,**



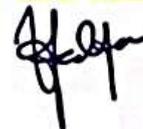
**Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE, MBA, Ph. D.
NIP. 196409291990032003**

Penguji II



**Drs. I.B. Artha Adnyana, M.Hum.
NIP. 196312311989031023**

**Badung, 22 Agustus 2023
Prodi Manajemen Bisnis Internasional
Ketua**



**Ketut Vini Elfarosa, SE, MM.
NIP. 197612032008122001**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jika orang lain bisa maka saya juga harus bisa..”

Persembahan :

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan”. Atas terselesaikannya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida Bhatara Hyang Guru, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, kerahayuan dan berkat yang selalu di berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ayah tercinta I Nyoman Widana., Ibu Komang Wahyuni, selaku orang tua yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan materi dalam penyusunan skripsi ini, sehingga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Ni Made Prabawati Budisunata yang selalu ada disetiap waktu genting dalam membagi ilmu disetiap proses skripsi ini.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gede Pramudya Ananta Hambarsika
NIM : 2215764022
Prodi : Manajemen Bisnis Internasional
Jurusan : Administrasi Bisnis

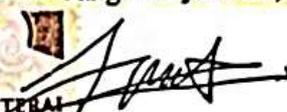
Dengan ini menyatakan bahwa naskah SKRIPSI saya dengan judul:

**“Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi
Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan”**

Adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah SKRIPSI ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BADUNG
Badung, 21 Juli 2023
Yang menyatakan,




Gede Pramudya Ananta
2215764022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pajak Air Tanah dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan yang dikarenakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 serta beberapa faktor penyebab lainnya. Beberapa wajib pajak mengajukan surat pemberhentian sebagai wajib Pajak Air Tanah dikarenakan kurangnya pendapatan yang didapat selama pandemi. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui strategi apa yang digunakan Bakeuda dalam manambah potensi dan mengajak kembali wajib pajak yang terhenti hingga terdaftar kembali. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penambahan potensi pajak sudah terlihat dari strategi yang digunakan oleh pihak bakeuda akan tetapi menurut peneliti dalam intern belum melakukan pembagian pendataan wilayah secara baik yang dikarenakan jumlah pegawai/staff yang minim untuk pembagian wilayah yang begitu banyak dan sulit dijangkau Kondisi nyata penggunaan strategi yang digunakan oleh pihak Bakeuda dengan cara terjun langsung untuk pendataan serta berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yang dikatakan bisa untuk dijadikan potensi oleh pihak Bakeuda agar tidak terjadi miskomunikasi dan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah lebih cenderung terhadap pegawai/staff yang dibagi agar dapat pemerataan wilayah serta fokus terhadap wilayah yang dijadikannya potensi baru.

Kata Kunci: Pajak Air Tanah, Badan Keuangan Daerah

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan” dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan syarat lulus Sarjana Terapan Program Studi Manajemen Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.

Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tak lepas dari bantuan, arahan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Drs. Ida Bagus Artha Adnyana, M.Hum., selaku Koordinator RPL Manajemen Bisnis Internasional Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Drs. I Ketut Yasa, M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian skripsi.

5. Ibu Kasiani, SE., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian skripsi.
6. Seluruh staff dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang turut membantu dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.
7. Keluarga terutama kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang membuat saya bertahan hingga titik akhir.

Penulis secara terbuka menerima pendapat, saran, serta kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat serta mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca.

Badung, 21 Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Hasil Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.1.3 Pajak.....	14
2.1.4 Fungsi Pajak.....	17
2.1.5 Jenis – Jenis Pajak.....	18
2.1.6 Manfaat Pajak.....	20
2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak.....	21
2.1.8 Asas Pengenaan Pajak.....	21
2.1.9 Pajak Air Tanah.....	22
2.1.10 Diagram Alir (<i>Flowchart</i>).....	24
2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis dan Sumber Data	29

3.3.1	Jenis Data	29
3.3.2	Sumber Data.....	29
3.2	Teknik Pengumpulan Data	30
3.3.1	Wawancara.....	30
3.3.2	Observasi.....	31
3.3.3	Dokumentasi	31
3.3	Metode Analisis Data	31
3.3.1	Pengumpulan Data	32
3.3.2	Reduksi Data	32
3.3.3	Triangulasi Data	33
3.3.4	Simpulan atau Verifikasi.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan	35
4.1.1.	Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.....	35
4.1.2.	Bidang Kegiatan.....	37
4.1.3.	Struktur Organisasi.....	39
4.2.	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	49
4.3.	Implikasi Hasil Penelitian.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		57
5.1.	Simpulan.....	57
5.2.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Wajib Pajak di Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ..	5
Tabel 2. 1 Simbol yang Digunakan Dalam Diagram Alir (Flowchart).....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan	40
Gambar 4. 2 Diagram Alur (<i>flowchart</i>) Strategi Bakeuda Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Air Tanah	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Petikan Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari indikator terpenuhinya salah satu syarat untuk kemakmuran rakyat, terutama dalam pemenuhan pada bidang ekonomi secara luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai masyarakat diharuskan untuk berkembang dan mengikuti perubahan serta pertumbuhan yang begitu pesat sesuai dengan perkembangan zaman khususnya dalam era digitalisasi ini.

Seiring perkembangan zaman dalam menjalankan suatu pemerintahan, tentunya membutuhkan sumber daya, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sumber pendanaan dalam menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan bergulirnya pelimpahan kewenangan dalam otonomi daerah, maka daerah menyambut dengan semangat dalam mengelola daerahnya masing-masing, termasuk dalam pengelolaan dari sektor pajak, dimana terdapat beberapa sektor pajak yang merupakan kewenangan pengelolaan pemerintah pusat dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, seperti pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

Sektor pajak merupakan komponen yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan baik pusat maupun daerah. Pajak memberikan masukan relatif besar terhadap pendapatan suatu negara maupun pendapatan daerah yang berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah).

PAD menitikberatkan aktivitas perekonomian yang memiliki konsep tidak membebani dan mengeksploitasi rakyat miskin dengan strategi memperbesar ruang fiskal daerah dengan melakukan pembenahan kebijakan penerimaan, khususnya sektor pajak dan retribusi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam mewujudkan hal tersebut yaitu dengan :

- a. Menyusun strategi yang komprehensif dan upaya yang serius untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah;
- b. Meningkatkan kesadaran publik untuk membayar pajak;
- c. Mencegah penyalahgunaan atau korupsi perpajakan dan mencegah praktik financial flows (modus penghindaran/pengelakan pajak);
- d. Sumber penerimaan pajak harus mencerminkan asas keadilan
- e. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang perlindungan, pengamanan, peruntukan aset-aset daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya

memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk pengelolaan urusan di tingkat daerah secara mandiri atau bisa disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat aturan dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri (Komang, 2022).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah yang menjadi leading sector pengelolaan pajak daerah melaksanakan pengelolaan 9 jenis pajak daerah diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dalam kesempatan ini penulis memilih salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Air Tanah sebagai objek penelitian dalam penyusunan proposal skripsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Memiliki tujuan sebagai penertiban dan penataan pemanfaatan Air Tanah yang diusahakan masyarakat serta meningkatkan PAD sebagai penunjang kegiatan pembangunan daerah melalui Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah pemungutannya dilakukan melalui pencatatan Water Meter (WM) yang terpasang pada wajib pajak. Besaran atas

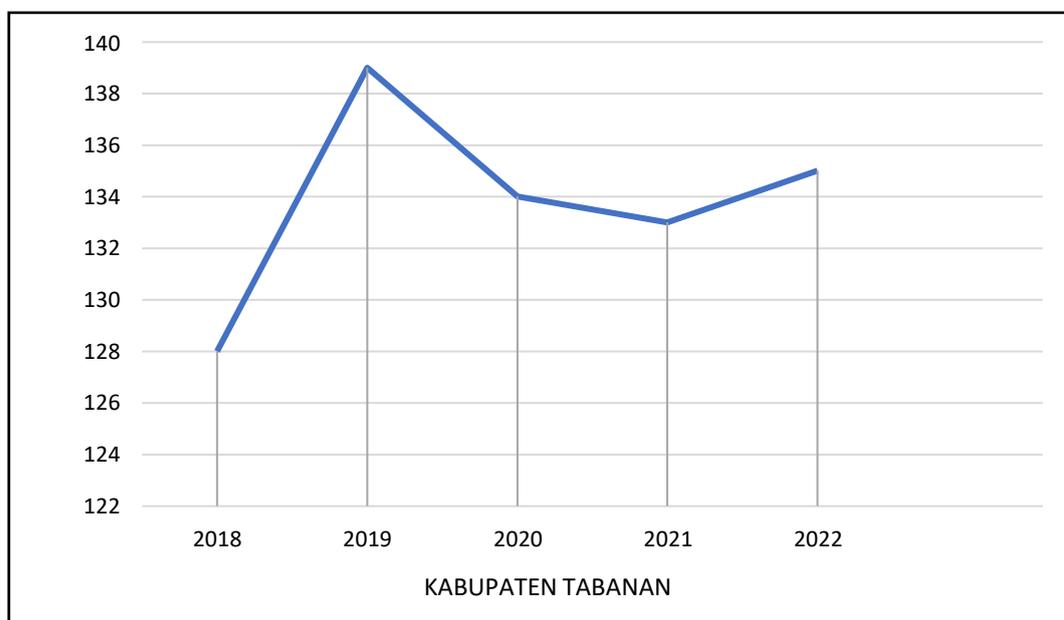
pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh wajib pajak terlihat pada water meter. Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah nilai air tanah yang telah diambil, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. Kegiatan pencatatan atas pemanfaatannya dilakukan oleh petugas pencatat yang selanjutnya dilakukan proses perhitungan atas ketetapan yang harus dibayarkan lalu diterbitkan dalam dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Tanah (SKPD-AT) untuk masa pajak atau setiap bulannya. Pemungutan pajak yang menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan pemungutan pajak dengan Official Assessment System atau besaran pajak yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan ini adalah pemungutan Pajak Air Tanah. Selain itu terdapat pemungutan pajak dengan Self Assessment System atau perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas layanan yang diperoleh, dilakukan langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan harus memberikan pelayanan yang baik mulai dari kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dalam pembayaran pajak tersebut. Hingga saat ini terdapat banyak badan usaha yang memanfaatkan penggunaan air tanah namun tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah tantangan baru yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang harus mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan jumlah

wajib pajak yang berpotensi dalam penggunaan Air Tanah. Jika tidak dikelola dengan baik dan tidak disertai pengawasan yang ketat, maka akan mengancam kelangsungan hidup sektor pajak.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dilanda kekhawatiran akibat belum tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan target penerimaan pajak daerah. Dalam upaya mewujudkan penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan target, peranan masyarakat dalam ketaatan membayar pajak tidak terlepas dalam hal ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bakeuda Kabupaten Tabanan mengenai jumlah penerimaan wajib pajak dilihat pada grafik berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Wajib Pajak di Kabupaten Tabanan Tahun 2021



Sumber: Bakeuda Kabupaten Tabanan

Dilihat dari tabel 1.1 mengenai jumlah penerimaan wajib pajak di Kabupaten Tabanan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak pada tahun 2019 namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan tersebut terjadi pada saat dunia sedang menghadapi pandemi covid-19. Adapun indikasi penyebab menurunnya jumlah wajib pajak di tahun 2020 dan 2021 yang bertepatan dengan terjadinya pandemi covid-19 adalah disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya penghasilan yang diperoleh pada saat pandemi covid-19 menurun sehingga pembayaran kewajiban pajak menjadi tertunda, oleh sebab itu terdapat wajib pajak yang mengajukan surat pemberhentian sebagai wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dengan beberapa asumsi tentang Pajak Air Tanah yang sangat berpotensi dalam kelangsungan hidup sektor pajak namun menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar karena terdapat penurunan jumlah potensi wajib pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor. Maka hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengetahui bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah khususnya pada sektor Pajak Air Tanah untuk bisa mengoptimalkan dalam peningkatan jumlah wajib pajak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana strategi sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan?

1.2.2 Apa saja hambatan-hambatan sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui strategi sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

1.3.2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian

Adapun kontribusi hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah

potensi wajib pajak dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut.

- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Program Studi Manajemen Bisnis Internasional di Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.
- 1.4.3 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis.
- 1.4.4 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan mengenai strategi dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak dalam sektor pajak air tanah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian mengenai “Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan” ini terdiri dari lima bab. Berikut uraian pembahasan pada masing-masing bab:

1.5.1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

1.5.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memberi pemaparan mengenai teori-teori yang telah didapat melalui studi literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian ditambah lagi dengan adanya contoh-contoh penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

1.5.3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis data yaitu data kualitatif, sumber data yang meliputi data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta metode analisis data yang menggunakan teknik analisis data kualitatif.

1.5.4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi profil singkat mengenai perusahaan dimana tempat penelitian dilakukan serta hasil analisis yang membahas strategi yang dilakukan oleh sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada badan keuangan daerah Kabupaten Tabanan.

1.5.5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi yang diberikan untuk pengembangan selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan wajib pajak di Kabupaten Tabanan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2018 menuju 2019 namun terdapat penurunan jumlah wajib pajak pada tahun 2020 dan 2021 setelah menerapkan strategi yang digunakan dari pihak badan v keuangan daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Penurunan tersebut terjadi pada saat dunia sedang menghadapi pandemi covid-19. Adapun indikasi penyebab menurunnya jumlah wajib pajak di tahun 2020 dan 2021 yang bertepatan dengan terjadinya pandemi covid-19 adalah disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya penghasilan yang diperoleh pada saat pandemi covid-19 menurun sehingga pembayaran kewajiban pajak menjadi tertunda, oleh sebab itu terdapat wajib pajak yang mengajukan surat pemberhentian sebagai wajib pajak pada Bakeda Kabupaten Tabanan. Dengan beberapa asumsi tentang Pajak Air Tanah (PAT) yang sangat berpotensi dalam kelangsungan hidup sektor pajak namun menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar karena terdapat

penurunan jumlah potensi wajib pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor. Maka strategi yang dilakukan oleh sektor PAT dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Bakeuda Kabupaten Tabanan yaitu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menambah obyek dan subyek pajak, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan pajak, menyediakan fasilitas yang memadai kepada staff/pegawai yang dapat mendukung kelancaran proses pencarian potensi wajib pajak, serta memberikan arahan serta melakukan pembinaan kepada staff dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku.

2. Dalam proses melaksanakan strategi untuk meningkatkan jumlah potensi wajib pajak tentunya menemukan berbagai hambatan. Adapun yang menjadi hambatan dalam meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Bakeuda Kabupaten Tabanan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan usahanya, maka dari itu Bakeuda Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Kepala Desa setempat untuk mendata usaha masyarakat yang tinggal di wilayahnya sehingga mudah mengetahui usaha yang terlapor ke kantor desa khususnya pada masyarakat yang menggunakan Air Tanah. Kendala selanjutnya yaitu kekurangan pegawai dalam mensurvei lokasi wajib pajak dikarenakan banyak potensi Obyek Pajak yang seharusnya dapat dijadikan potensi menjadi wajib pajak namun karena minimnya jumlah pegawai di Bakeuda Kabupaten Tabanan membuat pelaporan pajak yang tercatat

harus mendata ke wilayah lainnya. Kendala-kendala lainnya seperti data wajib pajak tidak muncul di sistem bank, lokasi keberadaan wajib pajak yang susah dijangkau oleh pegawai Bakeuda Kabupaten Tabanan, serta kurangnya pemahaman wajib pajak sebagai subjek pajak daerah, serta pemahaman tentang peraturan-peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pendataan potensi wajib pajak daerah harus dilakukan dengan baik dan harus dilakukan oleh petugas yang benar-benar paham tentang pajak daerah. Petugas harus rajin mencari sumber-sumber yang dapat dijadikan potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Tabanan dan harus lebih memaksimalkan penerimaan Pajak Air Tanah.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Bakeuda Kabupaten Tabanan perlu melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dan melakukan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak serta melakukan pengendalian serta pengawasan atas pungutan pajak daerah.
3. Perlu pengawasan yang lebih optimal dari atasan kepada bawahannya dalam hal pelayanan kepada wajib pajak. Karena bila pelayanan yang diberikan itu baik tentu wajib pajak akan memberi persepsi yang baik

terhadap pelayanan yang diberikan. Hal tersebut memberikan dampak untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terutama yang memiliki pengetahuan tentang pajak. Jika petugas sudah memahami tentang pajak, maka akan semakin mudah untuk memberikan sosialisasi serta memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Oleh sebab itu, Bakeuda Kabupaten Tabanan harus lebih teliti dalam memilih petugas untuk dijadikan sebagai petugas pajak (kolektor).

DAFTAR PUSTAKA

- Dady, F., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 63–72. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17138.2017>
- Damayanthi, M. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan*.
- Darmawan, F. (2020) ‘Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1.’, Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), pp. 6–25.
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Herdayani, M. P., S. Pd, and S. T. S. (2019). *Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian*. 7, 4.
- Heryanto. (2022) ‘Kerangka Pemikiran PAD, pp. 1–23.
- Jamaludin, A. N. (2018). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Komang. (2022) ‘Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel , Pajak Restoran , Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Natsir,AA. (2016) ‘Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten maros’.
- Tomas.(2020) ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan *Account Representative*, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan *E-filing* TerhadapKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan). Pp. 1-21.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No.32 Tahun 2004 pada bab VIII tentang Keuangan Daerah